



IN SIGHT

LBH Jogja Kawal Pedagang Teras Malioboro 2 sebelum Pindah ke Lokasi Permanen

Butuh Sosialisasi, Partisipasi, dan Ingin Relokasi Yang Menyejahterakan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja bertindak sebagai kuasa hukum sejumlah pedagang Teras Malioboro 2. Awalnya sebelum menerima kuasa itu, beberapa pengurus paguyuban pedagang mendatangi kantor LBH Jogja di Jalan Panembahan Romo, Kotagede, Jogja. Mereka menyampaikan curhat. Soal isu relokasi yang santer terdengar di telinga pedagang.

KUSNO S. UTOMO, Jogja

Baca Butuh... Hal 7



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SUARA PEDAGANG: Suasana di Teras Malioboro yang tahun depan direlokasi ke tempat permanen di Kawasan Ketandan. Foto kiri, Muhammad Rakha Ramadhan.

Butuh Sosialisasi, Partisipasi, dan Ingin Relokasi Yang Menyejahterakan

Sambungan dari hal 1

"Kabar relokasi itu benar-benar menggelisahkan para pedagang. Mereka merasa resah," cerita Muhammad Rakha Ramadhan dari Divisi Advokasi LBH Jogja dalam perbincangan dengan *Radar Jogja* kemarin (4/1).

Rakha, sapaan akrabnya, menceritakan, pangkal kegelisahan pedagang Teras Malioboro 2 itu karena mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam rencana relokasi ke tempat permanen. Informasi relokasi hanya diperoleh secara sepihak. Tidak ada informasi resmi menyangkut hal tersebut. "Mulanya tak ada pedagang yang tahu kapan akan direlokasi dan di mana lokasinya," jelas aktivis asal Makassar, Sulawesi Selatan, ini.

Tak ingin tinggal diam, LBH Jogja akhirnya mengambil sejumlah langkah. Di antaranya, mengadukan masalah tersebut ke DPRD Kota Jogja. Banyak masalah yang ada di Teras Malioboro 2 yang belum selesai. Itu buntut dari relokasi 2022 lalu. Sebelum menempati lahan di bekas Dinas Pariwisata DIJ Jalan Malioboro

53 Jogja, pedagang Teras Malioboro 2 berjualan di selasar Malioboro.

Dari identifikasi LBHJ Jogja ditemukan indikasi adanya 30 orang yang berdagang di Teras Malioboro 2 bukan pedagang yang semula berdagang di selasar Malioboro. "Bukan pedagang *kok* bisa dapat lapak di Teras Malioboro 2," tutur Rakha dengan nada penuh tanya.

Berbagai spekulasi muncul. Persoalan bertambah saat 15 orang pedagang tercecer. Mereka pedagang di selasar Malioboro, tapi tak dapat lapak di Teras Malioboro 2. Rinciannya, sejumlah delapan orang anggota Paguyuban Tri Dharma dan tujuh orang pedagang di TIC Pariwisata di dekat Bank BPD DIY kompleks Kepatihan. "Temuan itu telah kami sampaikan ke Dewan Kota yang kemudian membentuk pansus," jelas Rakha.

Belajar dari pengalaman relokasi 2022 itu, Rakha tak ingin kejadian tersebut terulang. Relokasi ke tempat permanen di kawasan Ketandan yang disebut-sebut akan direalisasikan awal 2025 harus dilaksanakan secara

transparan dan partisipatif. "Kami tidak menolak relokasi. Tapi kami ingin pelaksanaan relokasi yang menyejahterakan. Kami ingin dilibatkan dan pedagang jangan ditinggalkan," ingatnya mewanti-wanti.

Dalam upaya mendapatkan informasi seputar rencana relokasi ke tempat permanen, Rakha telah bertemu dengan berbagai pihak. Antara lain dengan UPT Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Jogja. Namun hasilnya dinilai kurang signifikan. Kemudian mendatangi Balai Kota Jogja guna bertemu dengan Pj Wali Kota Jogja Singgih Raharjo. Di samping itu juga datang ke kompleks Kepatihan. Tujuannya ingin berdialog dengan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.

Lantaran berbagai upaya itu belum membuahkan hasil sesuai harapan, pedagang didampingi LBH Jogja mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ. Usai aksi ke ORI, ada perubahan yang ditunjukkan Pemprov DIJ. Rakha bersama sejumlah pedagang Teras Malioboro 2 diundang

Paniradya Kaistimewaan DIJ.

Paniradya Pati Aris Eko Nugroho memberikan paparan menyangkut rencana relokasi ke kawasan Ketandan. Dalam paparan itu disampaikan relokasi diagendakan pada awal 2025. Desain tempat berdagang pedagang berupa gedung bertingkat. Mirip dengan gedung Teras Malioboro 1 yang menempati bekas Bioskop Indra.

Meski telah mendapatkan paparan, Rakha menyampaikan adanya catatan. Pihaknya belum mendapatkan kepastian soal kewenangan dalam relokasi itu. Mengutip penjelasan Paniradya Pati, saat masih berada di Teras Malioboro 2 kewenangan ada di Pemkot Jogja. Sedangkan ketika nanti menempati lokasi baru menjadi wewenang Pemprov DIJ.

Secara teknis Rakha ingin sirkulasi lapak pedagang semua bisa dijangkau pengunjung. Tidak hanya yang berada di depan. Pedagang yang di lantai atas juga harus ada jaminan. Karena itu, dia ingin ada dialog, sosialisasi, dan partisipasi. "Konsep relokasi yang menyejahterakan harus dikedepankan," tegasnya. (**laz/hep/by**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005